



KR-Surya Adi Lesmana

JUMATAN DI MASJID DUA ABAD: Sejumlah jemaah keluar dari Masjid Sela di Panembahan, Kraton, Yogyakarta usai ibadah Salat Jumat, (3/1/2025). Masjid tua dengan usia bangunan lebih dua abad ini dibangun pada era Sri Sultan HB I. Hingga saat ini masjid tersebut tetap lestari dan dipakai untuk ibadah warga maupun wisatawan.

Tak Ada

Sambungan hal 1

Setelah beberapa kali sidang, MK akhirnya memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang selama ini ditetapkan sebesar 20 persen. Hal itu tertuang dalam Putusan MK nomor perkara 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Kamis (2/1).

Pemohonan gugatan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut, jelas mereka, tidak mendapat intervensi dari pihak mana pun, baik institusi maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam perpolitikan di Indonesia. "Kami juga tegaskan, permohonan itu tidak mendapat intervensi dari organisasi, institusi maupun partai politik mana pun," katanya.

Gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut murni dilakukan sebagai bentuk perjuangan akademis dan perjuangan ad-

vokasi konstitusional. Menurut mereka, kajian tentang presidential threshold sudah dimulai sejak tahun 2023, saat mereka bergabung dalam Komunitas Pemernhati Konstitusi (KPK) di fakultas. Pada tahun tersebut, tim mereka masuk final dalam debat yang digelar Bawaslu RI.

"Komunitas pemerhati konstitusi ini fokus pada kajian-kajian pendekatan konstitusi dan respons-respons isu ketatanegaraan. Pada 2023, tim debat kami memasuki ranah final, yang pada babak akhirnya menggunakan mosi presidential threshold," ungkapnya.

Dari situ kemudian mereka mulai menyusun draf dan menulis terkait dengan gugatan permohonan ke MK pada Februari 2024. Sejak Februari 2024 hingga Januari 2025, mereka terus berproses di MK, bahkan harus menjalani tujuh kali sidang baik offline maupun online.

"Sebanyak 32 putusan MK sebelum-

nya menyatakan tidak diterima dan ditolak, kemudian pada permohonan ke-33 ini, akhirnya MK dapat menguatkan keinginan dari masyarakat Indonesia itu," katanya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Profesor Ali Sodikin mengatakan, dikabulkannya perkara tentang presidential Threshold di MK yang pemohonnya diajukan empat mahasiswanya itu adalah *landmark decision* (putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) karena berpoluh kali permohonan *judicial review* tentang pasal presidential threshold selalu ditolak MK.

"Dalam sejarah, inilah permohonan *judicial review* tentang presidential threshold yang dikabulkan, pemohonnya adalah mahasiswa kami yang masih belajar demokrasi dan hukum tata negara di Fakultas Syariah dan Hukum," katanya. (Ant/Obi)-f

Pengacara

Sambungan hal 1

Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto menyebutkan kasus dugaan pemerasan oleh mantan Ketua KPK Firdi Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) segera tuntas dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan ya, kita berusaha secepatnya 1-2 bulan lagi selesai," katanya saat

memimpin Acara Rilis Akhir Tahun 2024 Polda Metro Jaya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menambahkan, penyidikan atas penanganan perkara a quo pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB di Gedung Bareskrim telah dilakukan koordinasi dengan KPK RI ter-

kait penanganan perkara tersebut.

"Prinsipnya KPK RI mendukung sepenuhnya penyidikan yang saat ini dilakukan tim penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri terhadap penanganan perkara Tipidkor dengan tersangka FB," katanya. (Ant/Has)-f

Prabowo

Sambungan hal 1

Program skrining kesehatan akan digelar secara bertahap mulai tahun 2025 dengan menargetkan 60 juta orang. Selama lima tahun ke depan, diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani program tersebut.

Dedik juga menjelaskan bahwa Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis ini tidak hanya meliputi penyakit kardiovaskuler, melainkan berbagai penyakit lain yang dikelompokkan berdasarkan kategori anak, dewasa dan lansia.

"Pemeriksaan Kesehatan

Gratis merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025," lanjut Dedek

Pada usia balita, katanya, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan yang difokuskan pada deteksi penyakit bawaan lahir, seperti hipotiroid kongenital. Apabila terdeteksi, penyakit ini ditangani lebih awal, sehingga bisa mencegah risiko retardasi mental pada anak.

Bagi kelompok usia remaja, skrining kesehatan meliputi pemeriksaan obesitas, diabetes dan gigi. Skrining ini

difokuskan pada masalah kesehatan yang sering kali mulai berkembang di masa kanak-kanak dan remaja.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Badan PBB untuk Anak UNICEF menekankan pentingnya skrining kesehatan pada anak sebagai langkah krusial untuk mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan yang dapat memengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak.

la menilai, melalui skrining banyak penyakit dapat dicegah sebelum berkembang

menjadi kondisi yang lebih serius. Misalnya, dengan memberikan imunisasi yang tepat waktu dapat mencegah penyakit menular yang berpotensi mematikan.

Sementara program skrining untuk usia dewasa difokuskan pada pemeriksaan kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru dan usus besar. Sedangkan skrining untuk lansia, selain difokuskan pada penyakit-penyakit kardiovaskuler, deteksi juga dilakukan untuk deteksi penyakit akibat proses menua. (Ant)-f

Dilan(da) 12%

Sambungan hal 1

Ironisnya, pembatalan diumumkan setelah langkah penyesuaian ini terjadi, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Adanya pengumuman pembatalan kebijakan secara mendadak ini semakin memperkuat kesan bahwa pemerintah hanya melakukan uji coba kebijakan di tengah masyarakat atau bisa juga dipersiapkan bahwa pemerintah sedang melakukan icek ombak terkait rencana kebijakan ke depan.

Alhasil, bukannya menghadirkan kebijakan yang matang, keputusan ini seolah mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak memiliki koordinasi yang solid antara pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan. Pengumuman yang datang secara terburu buru ini memperlihatkan betapa buruknya perencanaan komunikasi dan manajemen isu yang dimiliki pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga dinilai gagal membangun narasi yang jelas dan konsisten

Sejak awal, alasan kenaikan PPN tidak disampaikan dengan data konkret yang dapat diterima masyarakat. Narasi bahwa kenaikan ini diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur atau meningkatkan layanan publik, hingga narasi untuk alokasi makan siang gratis ini tidak pernah dijelaskan secara terperinci. Sampai pada akhir kebijakan ini dibatalkan, tidak ada penjelasan komprehensif yang menyertai keputusan tersebut. Efeknya, pembatalan ini justru menimbulkan pertanyaan baru, yakni apakah pemerintah tidak memahami dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini sejak awal? Ataukah pemerintah hanya tunduk pada tekanan publik tanpa evaluasi yang mendalam?i

Komunikasi yang buruk ini juga berdampak nyata pada masyarakat dan pelaku usaha. Penyesuaian harga yang sudah dilakukan oleh beberapa pelaku usaha menjadi sia-sia, sementara

konsumen telah terlanjur merasa terbebani. Ketidakpastian seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mengganggu stabilitas pasar. Para pelaku usaha membutuhkan kejelasan dan konsistensi kebijakan agar mereka dapat merencanakan bisnis mereka dengan baik, sementara masyarakat memerlukan kepastian agar tidak terkejut dalam pengambilan akibat perubahan mendadak.

Untuk itu, pembatalan kenaikan PPN 12% seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperbaiki komunikasi publik. Pengambilan kebijakan yang berdampak luas harus melalui perencanaan matang, analisis risiko yang komprehensif, dan pentingnya komunikasi yang terarah sejak tahap awal. Pemerintah juga harus meninggalkan pola komunikasi reaktif yang hanya muncul setelah terjadi keresahan, dan mulai menerapkan pendekatan proaktif yang

transparan dan melibatkan masyarakat.

Ke depannya, pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dirancang dengan mempertimbangan dampak jangka panjang, disertai penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan platform digital untuk menjelaskan kebijakan secara langsung dan transparan juga dapat menjadi langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik.

Jika pola komunikasi yang buruk ini terus berulang, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin terkikis, yang pada akhirnya akan menghambat pelaksanaan kebijakan apa pun.

Oleh karena itu, keterbukaan, konsistensi, dan empati adalah kunci utama untuk menciptakan kebijakan yang diterima dan didukung oleh masyarakat. □ -f

(Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Amikom Yogyakarta)

OPSEN PAJAK BERATKAN INDUSTRI OTOMOTIF Masyarakat Enggan Beli Mobil Baru

JAKARTA (KR) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda) untuk kendaraan bermotor, memberatkan industri otomotif nasional. Penerapan opsen pajak kendaraan bermotor, cepat atau lambat nantinya bakal merugikan ekonomi daerah masing-masing, sehingga pemimpin daerah akan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti menerapkan relaksasi pajak.

"Yang paling sulit untuk pabrikan mobil dan untuk konsumen adalah pajak yang diatur oleh Pemda, namanya opsen. Itu yang membuat sektor otomotif akan berat," kata Menperin Agus ditemui di Jakarta, Jumat (3/1).

Agus memperkirakan tidak akan terlalu lama pemda-pemda nanti merasakan kebijakan opsen itu, justru akan merugikan ekonomi daerah sendiri. "Tidak akan terlalu lama. Itu saya melihatnya pemda-pemda itu akan melakukan atau akan mencari atau akan menerbitkan regulasi, misalnya untuk relaksasi," katanya.

Menurut Agus, pungutan tersebut nantinya turut membuat masyarakat enggan membeli

mobil baru, yang pada akhirnya pemerintah daerah tidak mendapatkan pemasukan. "Karena orang-orang lokalnya nggak akan bisa beli mobil. *At the end of the day* nggak jadi masuk ke mereka. Mereka nggak akan dapat income. Jadi ini kita mau memakai pendekatan yang segera. Artinya regulasinya diubah atau di ujungnya pasti pemda akan mengevaluasi," ujarnya.

Diketahui, pemerintah secara resmi mulai menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat pada Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenai opsen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Setiap jenis opsen memiliki peraturan yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah. (Ant/Has)-d

SELAMA OPERASI LILIN 2024

Kriminalitas dan Kecelakaan Menurun

JAKARTA (KR) - Polri mencatat tren kejahatan/kriminalitas dan angka kecelakaan lalu lintas menurun selama pelaksanaan Operasi Lilin 2024 sejak 21 Desember 2024 hingga ditutup pada 2 Januari 2025.

Kepala Operasi Lilin 2024 sekaligus Kepala Korlantas Polri Irfan Pol Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/1) mengatakan, pihaknya mengerahkan 132.327 personel selama operasi yang digelar dalam rangka pengamanan mobilitas masyarakat di masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) itu.

Pengerahan personel itu bersamaan dengan pendirian 2.794 pos pengamanan yang ditujukan untuk memastikan kelancaran ak-

tivitas masyarakat selama masa libur tersebut.

Irfan Aan mengungkapkan adanya penurunan tren kejahatan selama operasi ini berlangsung. "Dari yang sebelumnya 14.000 kasus pada tahun lalu, kini menjadi sekitar 13.000, atau turun sekitar 5 persen," ujarnya.

Dirinya juga mengungkapkan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjadi bisa ditangani dengan cepat.

"Ini hal yang positif, yang menggembirakan, dan kita bisa merasakan selama periode Operasi Lilin 2024 ini, syukur alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol," katanya. (Ant/San)-f

Penangkapan

Sambungan hal 1

tersebut terdiri dari 30 orang dari CIO dan 120 personel kepolisian, yang 70 di antaranya bersiaga di luar kompleks kepresidenan.

CIO mengajukan surat perintah penangkapan setelah Yoon mengabaikan tiga kali panggilan untuk pemeriksaan. Badan tersebut juga telah mendapat surat perintah untuk menggeledah kompleks kepresidenan.

Tim penasihat hukum Yoon menyebut surat perintah tersebut 'ilegal dan tidak sah'. Yun Gap-geun, seorang anggota tim penasihat hukum Yoon, Jumat (3/1) menyatakan

akan mengambil 'tindakan hukum' terhadap upaya CIO menangkap kliennya.

Pihak kepolisian menyatakan, apabila Dinas Keamanan Kepresidenan atau pendukung Yoon terus berusaha menghalang-halangi CIO melakukan tugasnya, mereka akan ditangkap dan didakwa menghalangi pelaksanaan tugas resmi. Apabila Yoon berhasil ditangkap, penyidik berencana membawanya ke kantor pusat CIO di Gwacheon, di selatan Seoul, untuk pemeriksaan sebelum melakukan penahanan terhadapnya. (Ant/Has)-f

KPK

Sambungan hal 1

Terkait pemeriksaan, penyidik menyampaikan 22 pertanyaan. Adapun pertanyaan itu menyangkut seputar perkara Harun Masiku. Meski demikian Ronny tidak menjelaskan lebih detail soal apa saja yang ditanyakan penyidik terhadap dirinya.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan tim penyidik KPK memeriksa Ronny F

Sompie (RFS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku (HM) dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

"Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan diminta keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," jelas Tessa Mahardhika Sugiarto. (Ful)-f

Dr Yance

Sambungan hal 1

Empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq dan Tsalis Khoirul Fatna, seluruhnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

Menurut Yance, dalil utama yang diajukan empat mahasiswa tersebut, aturan ambang batas pencalonan presiden selama ini telah menciptakan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Aturan itu dinilai bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas yang adil serta hanya menguntungkan partai-partai besar.

"Dalil mereka yang paling kuat adalah meminta MK meninjau ulang, bahwa presidential threshold sebagai *open legal policy* ternyata telah menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas yang adil," jelas Yance.

Menurutnya, dalil yang diajukan mahasiswa tersebut tidak hanya mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi saat ini, tetapi juga menawarkan solusi untuk membuka ruang politik yang lebih inklusif. Sebagai ahli, Yance mengaku hanya memberikan pengayaan terhadap argumentasi yang mereka ajukan.

Rektor UMY Prof Dr Achmad Nurmandi menilai, keputusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden sebagai angin segar demokrasi. Dengan demikian rekrutmen calon presiden semakin terbuka. Untuk pelaksanaannya, menurut Nurmandi,



Prakiraan Cuaca Sabtu, 4 Januari 2025

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Steman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

☀️ Cerah ☁️ Berawan 🌧️ Udara Kabur 🌧️ Hujan Lokal 🌧️ Hujan Pelir